

**IMPLEMENTASI PROGRAM *DIFABELPRENEUR* BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DI *WORKSHOP* SRIKANDI PATRA DI DESA
TAWANGSARI KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Niswatun Hasanah
NIM 20102050016**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Pembimbing:

**Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197508302006041002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-745/Un.02/DD/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PROGRAM *DIFABELPRENEUR* BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WORKSHOP SRKANDI PATRA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NISWATUN HASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 20102050016
Telah diujikan pada : Senin, 29 April 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
SIGNED

Valid ID: 664d7ad98f033



Penguji I

Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 664ccf16b7433



Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 664ac7d06e59b



Yogyakarta, 29 April 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 664d7670ef132

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto, Telp (0274) 515856, Fax. (0274) 5515856
Email: fd@uin-suk.c.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ditempat :

Assalamu'alaikum. Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Niswaton Hasanah
NIM : 20102050016
Judul Skripsi : Implementasi Program Difabelpreneur Bagi Penyandang Disabilitas Di
Workshop Srikandi Patra Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten
Boyolali

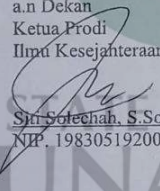
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

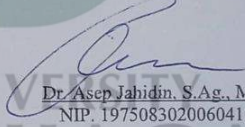
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Maret 2024

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Prodi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing


Siti Sotechah, S.Sos.I.M.Si
NIP. 198305192009122002


Dr. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197508302006041002

ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niswatun Hasanah
NIM : 20102050016
Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul tentang **IMPLEMENTASI PROGRAM DIFABELPRENEUR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI WORKSHOP SRIKANDI PATRA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TERAS KABUPATEN BOYOLALI** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 April 2024

Yang menyatakan,



Niswatun Hasanah

20102050016

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Niswaton Hasanah

NIM : 20102050016

Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tidak akan melepas jilbab pada foto Ijazah dan Transkrip nilai. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Maret 2024

Yang menyatakan,



Niswaton Hasanah

20102050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Kepada kedua orang tua tersayang,

Bapak Kawit dan Ibu Yatmi

Bentuk syukur dan terimakasih atas perjuangan serta dedikasi yang telah
diberikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tiada kesedihan yang abadi dan tiada kesulitan yang tak berakhir. Percayalah pada janji-Nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al Baqarah: 286)

Hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus, ada juga orang yang berlari sekuat tenaga lalu menemui jurang diujung jalanya (Hometown Cha-Cha)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program *Difabelpreneur* Bagi Penyandang Disabilitas Di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali”. Sholawat dan salam tetap turunkan kepada Rasul kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuknya sebagai teladan umat, sehingga keberkahan dan keridhaan skripsi ini mampu peneliti selesaikan tanpa halangan suatu apapun.

Penyusunan skripsi ini menjadi bukti sebagai pemenuhan tugas akhir serta untuk melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga, dengan rasa *tad'dhim* dari hati serta kesadaran dari dalam diri peneliti sangat menyadari bahwasanya skripsi tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan dan panjatan doa dari bapak,ibu dosen, orang tua dan berbagai pihak tanpa bosan, pernah lelah dalam memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada peneliti secara moral maupun material. Untuk itu, peneliti akan mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu secara penuh dalam proses penyelesaian skripsi ini. Maka, dengan rasa hormat peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar –besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Solechah S.Sos.I, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. DR. Muh. Ulil Absor, S.H.I., MA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan, saran, masukan, waktu dan ilmunya dalam proses penyusunan skripsi. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan waktunya.
6. Seluruh staff tata usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam proses akademik maupun proses administrasi.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman serta ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat tidak dapat disebutkan satu persatu selama masa studi.
8. Seluruh keluarga besar *Workshop* Srikandi Patra yang telah membimbing peneliti selama melaksanakan observasi di lapangan.
9. Seluruh Anggota Perangkat Desa Kelurahan Tawang Sari, Teras, Kabupaten Boyolali Terutama Ibu Kepala Desa Tawang Sari yaitu Ibu Yayuk Tutiek Supriyanti yang telah berkenan untuk memberikan izin, kesempatan serta informasi kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

10. Orang tua peneliti, Ibu Yatmi dan Bapak Kawit yang telah memberikan dukungan serta doa yang selalu menyertai peneliti selama ini.
11. Hanik Atul Munfa'ah selaku kakak perempuan peneliti yang tidak pernah telah dalam memberikan saran, kritik serta mampu menjadi *Support System* peneliti selama proses penelitian skripsi ini.
12. Teman-teman keluarga Awardee Bright Scholarship Batch 6 UGM – UIN Sunan Kalijaga yaitu Dinar Annasta Naja Mayra, Ekawati Shinta Dewi, Nur Isnaini Agustin, Puspa Silvia Jati, Shinta Sekar Larasti, Gusniarni Indhi Saputri, Zidni Amaliyatul H, Chaerunnisa H, Zahro Ulfatur, Zulfa Dwi Rizkiani dan Nabilatunnisa yang selalu memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan banyak nasihat serta mampu menjadi rumah untuk pulang bagi peneliti.
13. Teman –teman KKN 111 Sabrang, Purwosari, Salaman, Magelang yaitu yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
14. Teman –teman Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Angkatan 2020, selaku keluarga besar yang selalu kebersamai dalam proses belajar bagi peneliti selama masa studi dan mampu memberikan kenangan baru kepada peneliti.
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu sumbangsuhnya dalam bentuk moral maupun material. Saya ucapkan banyak terimakasih yang telah membantu untuk menyelesaikan segala rangkaian penelitian skripsi ini dengan lancar dan baik.

Semoga keberkahan, keikhlasan dan kebaikan dari semua pihak yang disebutkan maupun tidak mampu mendapatkan nikmat kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Peneliti masih menyadari bahwasanya pengerjaan skripsi penelitian ini sangat jauh dari kata-kata sempurna. Oleh karena itu, saran, masukan dan kritik dari berbagai pihak sangat peneliti perlukan untuk semua kebaikan pada kesempatan lainnya. Semoga, penelitian skripsi ini mampu memberikan kebaikan serta kebermanfaatan untuk ummat. Aamin Yaa Rabbal'alamin.

Yogyakarta, 5 Maret 2024

Niswatun Hasanah

NIM. 20102050016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Implementasi Program *Difabelpreneur* Bagi Penyandang Disabilitas Di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali

Berdirinya *workshop* srikandi patra dilatarbelakangi oleh anggota penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan kesejahteraan yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Boyolali. Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 2016 mengenai Hak Penyandang Anggota Disabilitas. *Workshop* Srikandi Patra merupakan sebuah tempat yang menaungi anggota penyandang disabilitas. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Boyolali terutama di Desa Tawang Sari sebagai tempat pemberdayaan keterampilan oleh kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian untuk mengetahui implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali serta kendala yang di dapatkan dalam implementasi program *difabelpreneur* bagi anggota penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program *difabelpreneur* untuk anggota penyandang disabilitas sesuai dengan teori implementasi dari Charles O. Jones yang melibatkan tahapan interpretasi atau tahap sosialisasi terkait program *difabelpreneur* kepada masyarakat dan stakeholder di Desa Tawang Sari Kabupaten Boyolali, tahap pengorganisasian atau penyusunan struktur anggota untuk menjalankan program tersebut dan tahap pengaplikasian atau proses pelaksanaan program tersebut kepada anggota penyandang disabilitas di *Workshop* Srikandi Patra. Pelaksanaan program *difabelpreneur* tersebut melibatkan *stakeholder* yang berperan sebagai pengelola dan penanggung jawab dari program tersebut. Penelitian ini juga memiliki kendala yang di hadapi oleh *stakeholder* terkait dalam mengimplementasikan program *difabelpreneur*. Kendala-kendala tersebut melibatkan keterbatasan fasilitas dan akses yang kurang memadai, selain itu, kondisi fisik anggota penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan, kurangnya pelatihan untuk meningkatkan sosial ekonomi bagi anggota penyandang disabilitas dan minat Pemerintah Kota dengan kegiatan yang dijalankan turut menjadi tantangan.

Kata Kunci: *Difabelpreneur*, Penyandang Disabilitas, Implementasi, program

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Implementasi Program	14
2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas	20
3. Pemberdayaan	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sumber Data.....	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Subjek dan Objek Penelitian	28
5. Metode Pengumpulan Data.....	29
6. Analisis Data	31
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II GAMBARAN UMUM.....	35
A. Letak Geografis Desa Tawang Sari	35
B. Kondisi Demografis Desa Tawang Sari	37
C. Profil Workshop Srikandi Patra	39
1. Sejarah Singkat Terbentuknya <i>Workshop</i> Srikandi Patra	39
2. Susunan Pengurus <i>Workshop</i> Srikandi Patra	42
3. Implementasi Program di <i>Workshop</i> Srikandi Patra	43

BAB III IMPLEMENTASI PROGRAM <i>DIFABELPRENEUR</i> BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI <i>WORKSHOP</i> SRIKANDI PATRA KABUPATEN BOYOLALI.....	46
A. Implementasi Program Difabelpreneur Bagi Penyandang Disabilitas Di Workshop Srikandi Patra Kabupaten Boyolali.....	46
1. Tahap Interpretasi.....	49
2. Tahapan Pengorganisasian.....	63
3. Tahap Pengaplikasian.....	69
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Proses Implementasi Program Difabelpreneur Bagi Penyandang Disabilitas di Workshop Srikandi Patra Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.....	79
BAB IV PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	96
A. Pedoman Wawancara.....	96
B. Pedoman Observasi.....	100
C. Daftar Riwayat Hidup.....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemanfaatan Lahan Desa Tawang Sari	35
Tabel 2.1 Data Disabilitas Penduduk Desa Tawang Sari	38
Tabel 2.2 Struktur Pengurus <i>Workshop</i> Srikandi Patra.....	42
Tabel 3.1 Struktur Pengurus <i>Workshop</i> Srikandi Patra.....	66



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali	37
Gambar 3.1 Dokumentasi Observasi	62
Gambar 3.2 Arsip Dokumentasi <i>Workshop</i> Srikandi Patra Melalui Observasi	69
Gambar 3.3 Gambar Dokumentasi Observasi.....	73
Gambar 3.4 Teori Implementasi Korten	74
Gambar 3.5 Dokumentasi dan Wawancara.....	77
Gambar 3.6 Wawancara dan Dokumentasi.....	85
Gambar 3.7 Wawancara dan Dokumentasi.....	87



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu penyandang disabilitas menjadi sebuah topik di Indonesia. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan sehingga dapat mengalami hambatan maupun kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Selain itu, penyandang disabilitas kerap disebut oleh masyarakat sebagai orang cacat dan orang yang tidak produktif untuk melakukan sesuatu bahkan tidak menghasilkan sesuatu dalam hidupnya dan menjalankan fungsi sosialnya.² Adapun penyandang disabilitas dapat terjadi oleh siapa saja baik itu anak-anak, remaja, dewasa, orang tua baik laki-laki maupun perempuan. Akibatnya bermunculan sisi negatif yang mereka rasakan seperti cemoohan, dikucilkan, diasingkan, dihina, dilecehkan dan sebagainya.

Munculnya stigma negatif dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas diakibatkan karena kurangnya pemahaman mengenai masalah disabilitas. Kondisi penyandang disabilitas menjadi sebuah konsep yang kurang disadari oleh beberapa elemen masyarakat. Meskipun penyandang disabilitas dapat terjadi kepada beberapa individu di seluruh dunia terutama di

¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1.

² Ebenhazer, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial" vol.9:3 (18 Maret 2022), hlm.807.

Negara Indonesia. Penyandang disabilitas dapat terjadi oleh siapa saja karena pada dasarnya tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik atau mental yang sempurna.³ Hal ini, dilansir dari meningkatnya jumlah penyandang disabilitas menurut WHO (*World Health Organization*) yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar atau setara dengan 16% populasi dunia.⁴

Data penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia.⁵ Hal ini, menyebabkan kondisi penyandang disabilitas di Indonesia mengalami ketimpangan dari beberapa ragam seperti: belum adanya pemerataan mengenai pendataan jumlah penyandang, ragam, usia, gender sampai tempat tinggal penyandang disabilitas.⁶ Akibatnya penyandang disabilitas di Indonesia masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang dan sangat lekat dengan kemiskinan. Sehingga mampu dikatakan bahwasanya penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.

Akibat permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami oleh penyandang disabilitas maka tidak heran jika mereka seringkali mendapatkan diskriminasi. Hal tersebut, dapat terjadi diakibatkan karena faktor lingkungan baik secara sosial dan fisik yang tidak ramah terhadap anggota penyandang

³ Rinda Philona, Novita L, "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram", *Jurnal Jatiswara*, vol. 36:1, (31 Maret 2021), hlm. 39.

⁴ WHO (World Health Organization), "Disability", <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

⁵ Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses pada tanggal 8 November 2023.

⁶ Nano Tresna Arfana, "Ketua MK: Penyandang Disabilitas Bagian Totalitas Masyarakat Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18346&menu=2>, diakses pada tanggal 3 November 2023.

disabilitas. Selain itu, dilatarbelakangi oleh masyarakat yang kurang mendukung aktualisasi dari potensi yang mereka miliki untuk bergabung dalam aspek sosial. Akibatnya, ditemukan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat yang seringkali dikucilkan. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka menganggap bahwa anggota penyandang disabilitas tidak memiliki potensi yang cukup untuk berkembang selayaknya individu yang lainnya.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka penyandang disabilitas harusnya memiliki hak yang sama dalam menjalankan aktifitas sosialnya. Sehingga Upaya pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjunjung tinggi akan hak bagi penyandang disabilitas yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berfokus terhadap kesejahteraan mereka. Kebijakan tersebut dibentuk oleh pemerintah termuat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 yang berisi mengenai “*pemenuhan kesamaan dan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek*”.⁸ Tujuan dibentuknya kebijakan tersebut untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera dan mampu mengembalikan fungsi sosialnya.

Proses yang bisa digunakan untuk membantu anggota penyandang disabilitas dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya memerlukan perhatian khusus dari semua *stakeholder* baik pemerintah, swasta, NGO (*Non Governmental Organization*) maupun masyarakat yang memiliki kepedulian

⁷ Sy Nurul Syobah, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur”, NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, vol. 15:2 (18 Desember 2018), hlm. 253.

⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1.

sosial.⁹ Hal tersebut perlu dilakukan kepada anggota penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ruang untuk mengaktualisasikan dirinya pada ranah publik. Sehingga, kesempatan kerja dan kesempatan untuk beraktivitas di ruang publik bagi anggota penyandang disabilitas sangatlah sedikit. Hal ini, terbukti dari contoh kasus Y kasus disabilitas daksa yang tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat serta tidak memiliki keterampilan apapun selama 33 Tahun. Hal tersebut, terjadi karena Y disembunyikan oleh keluarganya karena merasa malu dan dianggap sebagai sebuah aib dalam rumah tangga.¹⁰ Maka, kasus Y menjadi perhatian masyarakat sekitar untuk membantu menjalankan fungsi sosialnya dengan memberikan pelatihan keterampilan dan peluang ruang kerja inklusif bagi anggota penyandang disabilitas. Salah satu upaya tersebut dilaksanakan untuk membantu mengembalikan fungsi sosial serta perekonomian bagi penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan dan kesamaan hak seperti dengan individu lainnya.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwasanya anggota penyandang disabilitas masih mengalami kesenjangan untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Kondisi penyandang disabilitas tersebut dialami langsung oleh beberapa masyarakat difabel di Kabupaten Boyolali. Jumlah anggota penyandang disabilitas Kabupaten Boyolali dikutip dari solopos.com per

⁹ Tri Prasetyo Aji dan Dhita Hardiyanti Utami, "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program for the Disabilities Empowerment (Case Study: Schizophrenia Entrepreneurship Program for Pertamina Fuel Terminal Sanggaran Empowered Houses)", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol.1:3 (2022), hlm. 98.

¹⁰Wawancara Dengan Siti Fatimah, Koordinator Workshop Srikandi Patra, 15 November 2023.

tahun 2023 berjumlah 6.969 yang tersebar di beberapa kecamatan.¹¹ Data tersebut dapat dijadikan rujukan *social mapping* Pertamina untuk mengetahui bagaimana kondisi anggota penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali terutama Desa Tawang Sari. Mengetahui kondisi tersebut, maka PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali memanfaatkan kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk membantu mengembalikan fungsi sosial dengan memberikan keterampilan kepada anggota penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali terutama masyarakat Desa Tawang Sari.

Kegiatan tersebut merupakan sebuah program dari PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali yang disebut dengan program *difabelpreneur*. Selain itu, PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali mendirikan tempat untuk menjalankan program *difabelpreneur* bagi anggota penyandang disabilitas yang di namakan dengan *Workshop Srikandi Patra*. Program tersebut dibentuk oleh PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali untuk membantu memberikan dukungan sosial bagi anggota penyandang disabilitas berupa pelatihan membuat dengan mengirimkan salah satu anggota ke Balai Rehabilitasi YAKKUM Yogyakarta.

Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu jumlah penyandang disabilitas yang ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan tersebut terus bertambah dan bergabung di

¹¹ Cahyadi Kurniawan, "120 Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Boyolali" <https://soloraya.solopos.com/hanya-120-penyandang-disabilitas-di-boyolali-bekerja-di-perusahaan-1209150>, diakses tanggal 01 Mei 2024.

Workshop Srikandi Patra (Sanggar Inspirasi Karya Inovasi Difabel) yang menaungi anggota penyandang disabilitas dan telah berdiri sejak tahun 2017 silam.¹² Program tersebut dilaksanakan untuk mengajak anggota penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali menjadi seorang wirausaha atau *difabelpreneur* melalui kegiatan keterampilan yang dijalankan.

Pemberdayaan anggota penyandang disabilitas dalam proses implementasi program *difabelpreneur* tidak muncul begitu saja, melainkan menggunakan teori sebagai pisau analisis. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang sifatnya berkelanjutan.¹³ Proses implementasi program digambarkan dalam model kesesuaian oleh Charles O. Jones yang dibagi menjadi tiga tahapan utama dalam proses pelaksanaan program tersebut yaitu: Pertama, tahap interpretasi merupakan tahap menguraikan program yang akan dilaksanakan kepada pemerintah, perwakilan masyarakat dan *stakeholder* terkait. Kedua, tahap pengorganisasian atau tahap penyusunan struktur anggota untuk menjalankan

¹² Shabrina Farahzatu Ghassania dan Agus Naryoso, "Pemanfaatan Kegiatan Corporate Social Responsibility Difablepreneur Sebagai Media Untuk Membangun Reputasi Bisnis Pertamina", *Jurnal Interaksi Online*, Vol.9:2 (25 Februari 2021), hlm. 54.

¹³ Ananda Aprillia, Cucu Sugiarti, dan Lina Aryani, "Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, Vol. 6.2 (1 Desember 2021), hlm.205.

program tersebut. Ketiga, pengaplikasian atau tahap pelaksanaan program yang dijalankan kepada kelompok sasaran.¹⁴

Teori implementasi Charles O. Jones menempatkan program sebagai suatu sarana untuk mencapai sebuah tujuan dan alur pelaksanaan program tersebut. Masyarakat terutama anggota penyandang disabilitas sebagai fokus utama sekaligus pelaku utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan yang dijalankan terhadap program *difabelpreneur* tersebut. Berjalannya program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas bisa terlaksana karena adanya kerja sama antar semua stakeholder terkait. Seperti: PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali, Instansi Pemerintah Desa Tawang Sari dan masyarakat untuk menghasilkan program yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Program ini telah menghasilkan beraneka ragam kerajinan batik yang sudah banyak terjual beberapa di kalangan masyarakat maupun instansi perusahaan PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali.

Adanya program *difabelpreneur* bagi anggota penyandang disabilitas di Kabupaten Boyolali diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang berada di Kabupaten Boyolali terutama Desa Tawang Sari melalui kegiatan yang dijalankan di *workshop* Srikandi Patra. Program yang dijalankan bagi anggota penyandang disabilitas diharapkan mampu membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membuat batik yang dimilikinya. Selain itu, dari latar belakang ini penulis ingin mengetahui bagaimana

¹⁴ Ramdhani Puspita Rinanti, "Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata Masaran: Studi Kasus Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur", Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 18.

implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali dan apa yang menjadi kendala dalam implementasi program difabelpreneur bagi penyandang disabilitas di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengemukakan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali?
2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggambarkan mengenai implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali.
- b. Menggambarkan kendala yang dihadapi dalam implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra di Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian yang dilaksanakan diharapkan mampu menebar kebermanfaatan untuk pembaca. Baik bermanfaat secara teoritis melalui pengetahuan maupun secara praktis dalam praktik kehidupan sosial, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan terutama dalam konteks pekerja sosial industri di bawah nanungan PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis untuk CDO (*Community Development Officier*) yang menaungi PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali, yaitu dapat membantu untuk memperbaiki kondisi disabilitas di Desa Tawangsari dengan memberikan program untuk memperbaiki fungsi sosial, ekonomi, pemahaman dan kualitas mengenai implementasi program di bidang kesejahteraan sosial dan peningkatan fungsi sosial.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian skripsi ini merujuk kepada beberapa redaksi atau sumber penelitian terdahulu yang mampu dijadikan sebagai alat tolak ukur serta mempermudah dalam proses menyelesaikan penelitian. Selain itu, guna untuk memperdalam kajian penelitian terkait guna untuk memperdalam kajian penelitian terkait implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang

disabilitas di *workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali. Adapun beberapa persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

Pertama, Jurnal ditulis oleh Rut Dwi Ardiyantini tahun 2021, dengan judul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Khusus Terpadu Dalam Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program tersebut di Kabupaten Gunungkidul. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penulisan ini menghasilkan pemaparan bahwa implementasi berdasarkan analisis keluaran program dari tujuh indikator, masih memuat masalah pada lima indikator tersebut yaitu cakupan, frekuensi, bias, ketepatan layanan dan akuntabilitas.

Penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan diteliti. Persamaan pada penelitian yaitu berfokus terhadap implementasi program bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya, yaitu lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu di Kabupaten Gunungkidul sedangkan pada penelitian ini peneliti akan memilih lokasi di Kabupaten Boyolali. Selain itu, perbedaannya terdapat pada program yang dijalankan dalam penelitian ialah berfokus kepada kesehatan disabilitas sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pemberdayaan disabilitas melalui program *difabelpreneur*.

Kedua, jurnal ditulis oleh Ananda Aprilia Dkk tahun 2021, dengan judul “Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten

Karawang”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penulisan ini menghasilkan pemaparan bahwa implementasi program pemenuhan hak kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik namun belum dapat dikatakan optimal.

Penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan diteliti. Persamaannya ialah berfokus terhadap implementasi program bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu di Kabupaten Karawang sedangkan pada penelitian ini peneliti akan memilih lokasi di Kabupaten Boyolali. Selain itu perbedaannya terdapat pada program yang dijalankan dalam penelitian ialah berfokus kepada hak kesejahteraan sosial disabilitas sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada pemberdayaan disabilitas melalui program *difabelpreneur*.

Ketiga, Thesis ditulis oleh Afnesia Sitanggang tahun 2019, dengan judul “Implementasi Program Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pusat Rehabilitasi Yakkum”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tahapan-tahapan pada tiap proses program pelayanan yang diberikan bagi penyandang disabilitas di Pusat Rehabilitasi Yakkum yaitu, diterapkan enam tahapan pelayanan diantaranya tahap penerimaan dengan melihat keterbatasan penyandang disabilitas, tahap assesment dengan cara pendekatan secara

langsung, tahapan pembinaan dan bimbingan sosial sesuai keinginan penyandang disabilitas, tahap resosialisasi dan penyaluran secara langsung, tahapan pembinaan lanjut dengan cara pendampingan usaha dan tahapan terminasi dengan melihat kemandiriannya. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Penulisan ini menghasilkan pemaparan bahwa program pelayanan yang diberikan bagi penyandang disabilitas sudah sesuai dengan standar pelayanan di Pusat Rehabilitasi Yakkum dan terbukti menghasilkan penyandang disabilitas yang mandiri dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan.

Penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan diteliti. Persamaannya ialah berfokus terhadap implementasi program bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu di Kabupaten Sleman atau di Balai Rehabilitasi Yakkum. Sedangkan pada penelitian ini peneliti akan memilih lokasi di Kabupaten Boyolali atau di *Workshop* Srikandi Patra. Selain itu, perbedaannya terdapat pada program yang dijalankan dalam penelitian ialah berfokus kepada program pelayanan sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada program pemberdayaan disabilitas melalui program *difabelpreneur*.

Keempat, jurnal ditulis oleh Tri Prasetyo Aji dan Dhita Hardiyanti Utami yang berjudul “Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) Program Pemberdayaan Disabilitas (Studi Kasus: Program Kewirausahaan Skizofrenia untuk Terminal BBM Pertamina Rumah Berdaya Sanggaran)”.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Skizopreneur* dalam pemberdayaan disabilitas Rumah Berdaya Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Kualitatif. Penulisan ini menghasilkan pemaparan bahwa implementasi program dapat mencapai kemandirian serta kesejahteraan baik secara ekonomi dan sosial.

Penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan diteliti. Persamaannya ialah berfokus terhadap implementasi program kewirausahaan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu di Rumah Berdaya Denpasar sedangkan pada penelitian ini peneliti akan memilih lokasi di *Workshop* Srikandi Patra. Selain itu, perbedaannya terdapat pada program yang dijalankan dalam penelitian ialah berfokus kepada program pemberdayaan disabilitas *skizofrenia* sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada program pemberdayaan disabilitas melalui program *difabelpreneur*.

Kelima, Jurnal ditulis oleh Tukiman, Dkk tahun 2021, yang berjudul “Pemberdayaan Disabilitas Mental Melalui Program Karepe Dimesemi Bojo Di Kabupaten Jombang” Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan disabilitas mental melalui *karepe dimesemi bojo* di Desa Bangkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Deskriptif Kualitatif. Penulisan ini menghasilkan pemaparan bahwa penelitian ini menunjukkan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yang

menjadi indikator sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pemberdayaan disabilitas mental melalui *karepe dimesemi bojo* di Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang.

Penelitian ini dapat dianalisis berdasarkan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian skripsi yang akan diteliti. Persamaannya ialah berfokus terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu di Kabupaten Jombang sedangkan pada penelitian ini peneliti akan memilih lokasi di Kabupaten Boyolali. Selain itu, perbedaannya terdapat pada program yang dijalankan dalam penelitian ialah berfokus kepada program pemberdayaan disabilitas mental sedangkan pada penelitian ini berfokus kepada program pemberdayaan disabilitas melalui program *difabelpreneur*.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Implementasi Program

a. Konsep Dasar Teori Implementasi

Pengertian makna implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti melaksanakan atau menerapkan, sedangkan makna program berarti sebuah susunan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan dari sebuah kebijakan atau program.¹⁵

Implementasi akan menjadi aspek penting untuk menjadi sebuah cara supaya kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sebuah implementasi

¹⁵ Syamsul Bhari, Bedjo Sujanto, dan Madhakomala, Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu, 2020 ed., 1 (Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

mampu dipandang sebagai proses interaksi antara perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai sebuah kebijakan.

Sehingga, pada dasarnya implementasi dan kebijakan merupakan satu kesatuan yang utuh. Beberapa gabungan unsur dan tujuan dari suatu kebijakan nantinya akan melahirkan implementasi yang merupakan dampak dari tujuan kebijakan tersebut.¹⁶ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Fullan implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan kelompok, lembaga dan komunitas dapat menerima dan melakukan perubahan.¹⁷

Model implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Charles O. Jones ini memperkaya model implementasi kebijakan yang dapat diketahui dari kata kunci kesesuaian yang digunakan.¹⁸ Namun berdasarkan model yang dikembangkan dapat dipahami bahwasanya jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan tidak akan berhasil sesuai apa yang diharapkan. Model implementasi sangat penting digunakan dalam setiap elemen pemerintah, masyarakat, kelompok maupun organisasi untuk menjalankan program-programnya.

¹⁶ Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol.10:1 (31 Januari 2021), hlm. 12.

¹⁷ Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, vol.04:1 (01 Januari 2017), hlm. 37. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/download/478/396>

¹⁸ Ibid., hlm. 13.

Model implementasi menurut Jones, merupakan sebuah sarana yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, pada pelaksanaan program tersebut memerlukan tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Tahapan Interpretasi

Tahap interpretasi yaitu suatu tahapan untuk menguraikan secara rinci mengenai program yang sifatnya abstrak menjadi operasional atau suatu program yang masih bersifat umum menjadi suatu kebijakan yang sifatnya menjadi manajerial. Tahap interpretasi dilaksanakan melalui sosialisasi massa bersama masyarakat, pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat supaya mampu mengetahui mengenai tujuan, arahan serta sasaran program tersebut. Beberapa proses interpretasi memiliki 3 tahapan utama untuk mensosialisasikan program yang telah dibentuk kepada kelompok sasaran yaitu sebagai berikut:²⁰

a) *Clarity* (kejelasan)

b) *Consistency* (Konsistensi)

c) *Adequate Resources* (ketersediaan sumber daya)

Sehingga sumber mengenai interpretasi mengenai implementasi program memegang peranan penting untuk menjalankan program yang telah dibentuk. Suatu program tidak akan berjalan dengan baik

¹⁹ Charles O.Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 16-17.

²⁰ Adriansyah, Alexandri, dan Halimah, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung", *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, vol.4:1, hlm. 16."

apabila tidak efektif dan di dukung oleh sumber –sumber yang telah disediakan.²¹

2) Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian dilaksanakan setelah tahap interpretasi selesai dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat untuk menjalankan program *difabelpreneur* tersebut. Tahap Pengorganisasian merupakan tahap pelaksanaan kegiatan penyusunan yang akan dibagi menjadi dua tahap pelaksanaan untuk menjalankan program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra di Desa Tawang Sari Kabupaten Boyolali seperti:

a) Pelaksanaan Kebijakan

Tahap pengorganisasian merupakan suatu tahapan sebagai proses untuk menentukan *stakeholder* untuk melaksanakan sebuah program yang akan dilaksanakan di kelompok sasaran.

Selain itu, tahapan pengorganisasian yang akan menentukan tugas, pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab dari berbagai pelaku kebijakan maupun pelaksana kebijakan.

b) Standar Operasi Prosedur (SOP)

Berdasarkan pemilihan tersebut maka, Standar Operasi Prosedur (SOP) dibuat dalam menentukan suatu kebijakan yang memiliki tujuan utama sebagai tuntunan, referensi serta

²¹Alexander Phuk Tjilen: Konsep Teori dan Tehnik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Bandung: Nusa Media., 2019), hlm. 42.

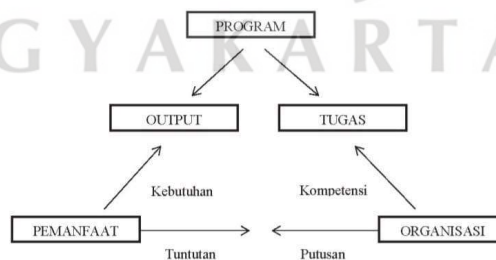
panduan kepada pelaku program untuk memberikan pengetahuan mengenai kegiatan yang dilaksanakan, sasaran program dan apa capaian yang akan dituju pada program yang telah disusun.

3) Tahapan Pengaplikasian

Tahap aplikasi merupakan tahap yang berisi mengenai penerapan pada rencana proses implementasi program kepada kelompok sasaran. Maka, tahapan ini dilaksanakan untuk mewujudkan terlaksananya program yang telah dibentuk pada tahapan interpretasi dan tahap pengorganisasian.

Namun dalam menjalankan program dapat diukur seberapa jauh kelembagaan tersebut mampu menjalankan fungsinya secara efektif atau belum kepada kelompok sasaran. Tolak ukur tersebut dapat dianalisis menggunakan model kesesuaian Korten sebagai tambahan teori untuk memperkuat program yang dijalankan kepada kelompok sasaran.

b. Model Kesesuaian Program David C. Korten



Gambar 1. Model Kesesuaian David C. Korten
Sumber: David C. Korten (1988) dalam Tarigan, hlm 19)

Gambar 1.1 Model Kesesuaian Kebijakan David C.Korten

Berdasarkan gambar diatas dapat dipahami bahwasanya model implementasi tersebut dilihat sebagai suatu proses belajar sosial yang sifatnya kolaboratif antara birokrasi dari tingkat lokal kelompok sasaran dengan komunitas. Berdasarkan kesesuaian implementasi program menurut Korten yaitu sebagai berikut:²²

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu kebijakan atau program akan berhasil jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi kebijakan atau program yaitu: *Pertama*, kesesuaian antara kebijakan dengan kelompok sasaran atau pemanfaat. *Kedua*, kesesuaian antara kebijakan atau program dengan organisasi pelaksana. *Ketiga*, kesesuaian antara kelompok sasaran atau pemanfaat dengan organisasi pelaksana.

Kinerja suatu program yang dilaksanakan tidak dapat bergerak dengan baik dan lancar apabila terjadi tidak adanya keselarasan antara tiga bagian implementasi program yang telah dijabarkan diatas. Hal tersebut, sangat dibutuhkan pemahaman mengenai proses implementasi yang akan dijalankan. Sehingga, apabila pelaksana kebijakan tidak mempunyai *skill* atau kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab yang telah dibentuk oleh pemangku kebijakan (*stakeholder*). Maka, seorang pelaksana program tidak akan mampu untuk memberikan saran serta masukan dari program yang telah dibentuk secara baik dan

²² Syamsul Bahri, dkk., *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020), hlm. 17-18.

tepat. Sehingga, apabila persyaratan telah dibentuk oleh pelaksana program namun tidak dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Maka, *output* yang didapatkan dari program tersebut tidak memiliki nilai yang jelas. Oleh sebab itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program diatas sangatlah diperlukan supaya program yang telah dibentuk dapat berjalan dengan baik.

Penerapan model kesesuaian Charles O. Jones tersebut dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan program kepada kelompok sasaran. Sehingga model implementasi Program oleh Charles O. Jones dan David C. Korten yang akan digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Terdapat tiga dimensi utama yang ditawarkan nantinya akan menjadi rujukan untuk dielaborasi dengan data lapangan yang berkaitan dengan implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan aktivitasnya.

2. Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk

berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²³ Kata penyandang disabilitas berasal dari terjemahan kata Bahasa Inggris yaitu *diffable* yang berasal dari istilah *people with different abilities* yang artinya orang-orang dengan kemampuan berbeda.²⁴ Adapun definisi disabilitas menurut *World Health Organization* (WHO), menyebutkan bahwa:²⁵

“Disability is an umbrella term, covering impairments, activity limitations and participation restriction. An impairment is a problem in body function or structure, an activity is a difficulty encountered by an individual in executing a task or action, while a participation restriction is a problem experienced by an individual in involvement in life situations”.

Selain itu, pemahaman mengenai arti dari penyandang disabilitas dijelaskan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) bahwa “Disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami serta memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mendalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.²⁶

Selain itu, anggota penyandang disabilitas memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda sehingga memerlukan bentuk akomodasi yang

²³ Rinda Philona dan Novita Listyaningrum, “Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram,” *Jurnal Jatiswara*, vol. 36:1, (31 Maret 2021), hlm. 38–48.

²⁴ Aldi Alfian Alfatah, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta”, *Skripsi (Yogyakarta: Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2021) hlm.19.*

²⁵ WHO (World Health Organization), “*Disability*”, diakses pada 17 Oktober 2023”

²⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1.

berbeda untuk setiap ragamnya. Macam-macam penyandang disabilitas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) yaitu:²⁷

1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik yaitu terganggunya fungsi gerak individu. contoh: amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan lainnya.

2) Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikiran atau pola pikir karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. contoh: disabilitas grahita dan *down syndrome*.

3) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikiran, emosi dan perilaku antara lain psikososial dan kemampuan interaksi sosial. Contoh: Psikososial (*Skizofrenia*, bipolar, depresi, gangguan kepribadian dan lainnya), interaksi sosial (autis dan hiperaktif).

4) Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan disabilitas wicara.

²⁷ Aprilina Pawestri, "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, vol.15:1 (Juni, 2020), hlm. 169.

Maka, Penyandang Disabilitas menjadi sebuah permasalahan sosial di Negara Indonesia. Hal ini, menjadi masalah serius yang mengakibatkan penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata oleh beberapa masyarakat bahkan menjadi trend topik yang ramai diperbincangkan di berbagai konferensi internasional.²⁸ Akibat diskriminasi yang terjadi kepada Penyandang Disabilitas maka, masih ditemukan kurangnya hak-hak mengenai bagi anggota penyandang disabilitas.

3. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata dasar yaitu *power* yang artinya kekuatan atau keberdayaan. Maka, pengertian pemberdayaan adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat supaya dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan yang dimiliki supaya dapat menemukan masa depan secara partisipasi dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang lainya.²⁹ Secara epistemologi pemberdayaan dapat di definisikan sebagai aksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat pada komunitas yang membentuk

²⁸ Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur, Nuansa: Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, vol. 15:2 (Desember, 2018), hlm.259."

²⁹ Ayatullah Rohmaini, "Efektivitas Program Better Lives Yang Dilaksanakan Yayasan Sayap Ibu Bintaro Tangerang Selatan Banten", Skripsi (Jakarta, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023), hlm. 38.

perencanaan secara kolektif untuk memecahkan masalah permasalahan sosial yang terjadi melalui musyawarah bersama.³⁰

Proses pemberdayaan ini dimasukkan kedalam kerangka teori untuk dijadikan analisis penguat data penelitian. Bahwasanya kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilaksanakan oleh PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali merupakan kegiatan pemberdayaan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sehingga pemberdayaan perlu dijadikan penguat basis analisis teori pada proses implementasi atau pelaksanaan program yang dilaksanakan.

b. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan strategi pembangunan berbasis masyarakat yang merujuk kepada perbaikan menuju lebih baik dari segala aspek yang berpengaruh dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga dapat diketahui bahwasanya tujuan adanya program *difabelpreneur* bagi anggota penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra menjadi kegiatan pemberdayaan sosial. Adapun tujuan pemberdayaan melalui program *difabelpreneur* tersebut dapat dilihat berdasarkan berikut ini:³¹

- 1) Perbaikan pendidikan (*Better Education*), artinya dalam proses pemberdayaan harus dirancang dalam bentuk pendidikan yang

³⁰ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif", *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, vol. 1:2 (21 Oktober 2021), hlm. 82–110.

³¹ Rohmani, "Efektivitas Program *Better Lives* Yang Dilaksanakan Yayasan Sayap Ibu Bintaro Tangerang Selatan Banten", (Jakarta: Program Stuid Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwh dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2023, hlm.39."

lebih baik, jadi tidak hanya perbaikan fisik melainkan mengacu kepada minat dan semangat belajar dalam jangka waktu panjang.

- 2) Perbaikan aksesibilitas (*Better Accesibility*), artinya setelah proses perbaikan pendidikan selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitasnya. Paling utama yaitu inovasi, informasi, pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan lembaga pemasaran.
- 3) Perbaikan tindakan (*Better Action*), yaitu adanya perbaikan pendidikan serta aksesibilitasnya, selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki tindakan ke arah yang lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*), artinya ialah perbaikan suatu tindakan diharapkan mampu memperbaiki kelembagaan termasuk jejaring kemitraan usaha yang dijalani.
- 5) Perbaikan usaha (*Better Business*) dan perbaikan pendapatan (*Better Income*) artinya perbaikan bisnis yang diakibatkan dari perbaikan pendidikan, aksesibilitas dan kelembagaan yang mampu memperbaiki pendapatan masyarakat.
- 6) Perbaikan lingkungan (*Better Environment*), merupakan semakin baiknya pemasukan masyarakat akan memicu untuk perbaikan lingkungan secara fisik maupun sosial.

c. Aspek-aspek Kegiatan Pemberdayaan

Aspek-aspek kegiatan pemberdayaan dilaksanakan untuk menganalisis keberlanjutan masyarakat terutama bagi anggota penyandang disabilitas. Sehingga tujuan utama dalam pengelolaan

sumber daya wilayah dari implementasi program untuk melaksanakan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan sosial ekonomi sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk pemberdayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan suatu proses pembangunan ekonomi.³²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penulisan skripsi sangat penting dilaksanakan untuk memperoleh data yang cukup serta jelas saat penelitian dilakukan. Peneliti dalam menulis skripsi ini mengadopsi metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial atau kemanusiaan.³³ Menurut Bogdan dan Taylor dalam sebuah penelitian yaitu sebuah penelitian yang melibatkan suatu prosedur pada penelitian yang dapat mengumpulkan suatu data yang bersifat deskriptif mengenai tulisan, perilaku dan ucapan narasumber yang menjadi objek pengamatan dalam sebuah penelitian.³⁴

³² Hendra dkk, "Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol.12:1 (Juni, 2023), hlm. 78.

³³ Jhon W.Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kauntitatif dan Mixed*, ed. 3, cet. 6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.4.

³⁴ Abdusamad Z, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm.25.

2. Sumber Data

Proses penelitian ini memiliki jenis-jenis data yang biasa dipakai berdasarkan data primer dan sekunder.³⁵ Adapun data yang dihasilkan dalam proses penelitian ini merupakan suatu objek atau bidang yang akan dijadikan fokus penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli di lokasi atau objek penelitian. Data tersebut dapat berupa hasil dari suatu wawancara dengan informan dan hasil dari observasi di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui dokumentasi, penelitian, jurnal penelitian dan buku referensi terkait dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di *Workshop* Srikandi Patra di Desa Tawangsari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. *Workshop* srikandi patra merupakan sebuah tempat yang di dirikan untuk menaungi segala aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan program *difabelpreneur* yang ditujukan kepada anggota penyandang disabilitas di Desa Tawangsari.

³⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm.11.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pemilihan responden yang disebut dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive Sampling* merupakan sebuah metode *non random sampling* dimana peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas special yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan mampu menganalisis secara mendalam terkait kasus riset.³⁶ Maka, untuk menentukan subjek penelitian ini didapatkan melalui kriteria yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota penyandang disabilitas Aktif di *Workshop* Sriakandi Patra
- b. Konsisten dengan kegiatan yang dijalankan
- c. Bertanggung jawab dengan program yang diberikan
- d. Memiliki kemauan untuk dilakukan wawancara tanpa ada paksaan

Berdasarkan jumlah anggota penyandang disabilitas yang berada di *workshop* sriakandi patra yaitu berkisar 20 orang. Namun, peneliti melakukan penyaringan berdasarkan kriteria diatas, sehingga menemukan beberapa subjek penelitian adalah:

- a. Informan 1 Penyandang Disabilitas Fisik (R) sebagai anggota *Workshop* Sriakandi Patra Kabupaten Boyolali.
- b. Informan 2 Penyandang Disabilitas Daksa (W) sebagai anggota *Workshop* Sriakandi Patra Kabupaten Boyolali.

³⁶ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, vol. 6: 1 (30 Juni 2021), hlm. 343.

- c. Koordinator 1 selaku ketua *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali Ibu Siti Fatimah
- d. Kepala Desa Tawang Sari Ibu Yayuk Tutiek Supriyanti
- e. CDO PT. Pertamina Fuel Terminal Boyolali Ibu Destika Ayushelita

Sedangkan objek pada penelitian adalah pokok pembahasan dari penelitian ini yaitu mengenai Implementasi program *difabelpreneur* bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali. Objek penelitian dipilih karena belum ada penelitian yang meneliti tentang Implementasi Program Difabelpreneur Bagi Penyandang Disabilitas Di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali, sejak komunitas didirikan oleh anggota (*Corporate Social Responsibility*) CSR oleh PT. TBBM Pertamina Boyolali. Sehingga, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Program Difabelpreneur Bagi Penyandang Disabilitas Di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali dilaksanakan di masyarakat.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi atau data adalah prosedur yang diperlukan bagi seorang peneliti untuk memperoleh data dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, metode pengumpulan data berfungsi sebagai metode yang tidak memiliki ketergantungan pada metode analisis data karena dapat menjadi alat analisis data serta metode yang digunakannya.³⁷ Dalam penelitian ini,

³⁷ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 110.

peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan suatu data yang melibatkan percakapan antara peneliti dan subjek yang sedang diamati. Sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang melibatkan suatu pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan diajukan kepada informan yang akan diamati.³⁸ Pada penelitian ini, peneliti akan melaksanakan wawancara bersama anggota penyandang disabilitas.

b. Observasi

Metode observasi ialah proses mengamati dan kegiatan penjabaran tentang fenomena yang dilaksanakan secara sistematis.³⁹ Penelitian ini akan melaksanakan proses observasi secara partisipan agar data yang diperoleh jelas. Penelitian skripsi ini peneliti memperhatikan secara langsung kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian, seperti: pemenuhan aksesibilitas komunitas kepada penyandang disabilitas dan kegiatan yang dijalankan penyandang disabilitas di dalam komunitas tersebut. Observasi merupakan suatu pelengkap pada saat proses wawancara. jadi, pada penelitian kegiatan

³⁸ M Makbul, "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian", (Makassar: Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan, UIN Alauddin, Makassar 2021), hlm 9.

³⁹ Muhammad Abdurrohman, "Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta)" Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 33.

observasi dilaksanakan dengan cara peneliti ikut terjun langsung di *workshop* srikandi patra untuk mengetahui bagaimana program difaabelpreneur dilaksanakan dengan baik atau belum.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik atau proses untuk mengumpulkan seluruh data dengan menganalisis berbagai macam data tertulis, seperti: majalah, buku, peraturan tertulis, dokumentasi, catatan harian dan notulen rapat.⁴⁰ Jadi, Dokumentasi digunakan untuk memperoleh kelengkapan bukti data penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan mencatat maupun mengambil data yang diperoleh oleh narasumber guna untuk memperkuat bukti penelitian yang diperoleh di lapangan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴¹ sehingga analisis data menjadi proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data dilaksanakan melalui kualitatif secara empiris.

⁴⁰ Lailla Hammada, “Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas”, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 16.

⁴¹ Sofiatul Jannah, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Soerabaja Printing Indonesia)”, Skripsi (Jember : Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, IAIN Jember, 2021), hlm. 33.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu rangkaian yang dilaksanakan dalam memilih, menyederhanakan dan merangkum hal-hal pokok serta memfokuskan kepada hal-hal penting. Proses reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan dan abstraksi data. Sehingga, data-data yang telah dipilih dan disederhanakan dapat memberikan gambaran yang jelas. Sehingga, mampu memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data yang masih diperlukan. Dengan begitu, reduksi data dapat membantu mempercepat proses analisis data dan mempermudah pemahaman peneliti mengenai data yang sudah diperoleh.

b. Penyajian Data

Setelah menyelesaikan tahapan reduksi data maka langkah peneliti selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, teks, transkrip dan lainnya.

Tujuannya yaitu dengan memberikan penyajian data yang baik dan benar maka, hal ini akan memudahkan untuk memahami dan informasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengambil keputusan.

c. Penarikan Kesimpulan

Merupakan hasil dari seluruh rangkaian data yang sudah diteliti pada saat awal hingga akhir penelitian. Selain itu, peneliti akan merumuskan data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, temuan

tersebut dapat di analisis berdasarkan data yang di dapatkan berupa gambaran mengenai subjek yang sebelumnya belum memiliki kejelasan menjadi subjek yang jelas, rinci, hipotesis, interpretatif, maupun teori.⁴²

d. Keabsahan Data Penelitian

Proses yang dilaksanakn untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik melalui wawancara, observasi dan dokumen. Tujuan teknik triangulasi untuk penelitian ini ialah membandingkan data yang dapatkan melalui informasi dari subjek dengan informasi dari beberapa informan. Maka, triangulasi menjadi sebuah strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan keakuratan dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya proses yang dihasilkan pada penulisan penelitian ini tertata, sistematis, rapi serta dapat membahas permasalahan secara holistik maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab di antaranya:

Bab I, terdapat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

⁴² Muhammad Abdurrohman, "Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta)" Skripsi (Yogyakarta, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 37"

Bab II, merupakan pemaparan mengenai gambaran umum *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali. Dalam memperkaya penelitian maka peneliti menggambarkan mengenai: kondisi geografis, alamat dan sejarah atau kejadian berdirinya komunitas, visi-misi, susunan komunitas, daftar pekerjaan, anggota staf lembaga, gambaran proses pelayanan program yang berada di komunitas atau lokasi penelitian.

Bab III, merupakan pembahasan mengenai hasil atau pembahasan penelitian terhadap implementasi program difabelpreneur bagi penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra Kabupaten Boyolali serta Kendala yang dihadapi dalam menjalankan program difabelpreneur bagi penyandang disabilitas di orkshop srikandi patra Kabupaten Boyolali.

Bab IV, merupakan bagian terakhir penelitian yang akan berfokus kepada rangkuman hasil penelitian, rekomendasi dan saran yang dapat diajukan sebagai pertimbangan bagi sasaran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil analisis menurut pembahasan yang sudah diuraikan pada bab diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hasil penelitian tentang implementasi program difabelpreneur bagi penyandang disabilitas di *Workshop* Srikandi Patra Kabupaten Boyolali.

Sebagai proses untuk implementasi suatu program bagi anggota penyandang disabilitas, Pertamina Fuel Terminal Boyolali bersama Pemerintah Desa Tawang Sari memberikan program difabelpreneur bagi anggota yang membutuhkan. Implementasi program tersebut dilaksanakan melalui tiga tahapan. *Pertama*, tahap interpretasi yang dilaksanakan untuk melakukan pemaparan atau sosialisasi terkait program secara jelas kepada *stakeholder* (pemangku kebijakan), pelaksana kebijakan serta perwakilan masyarakat sebelum program tersebut dilaksanakan. *Kedua*, tahap pengorganisasian dilakukan untuk melakukan pembentukan sumber daya yang dimiliki seperti pemilihan struktur pengurus yang dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan berlaku dan tidak ada paksaan apapun untuk membaantu memantau program tersebut. *Ketiga*, tahap pengaplikasian merupakan tahap pelaksanaan program yang telah dibentuk berupa program *difabelpreneur* yang ditujukan kepada anggota penyandang disabilitas. Selain itu, pada tahap pengaplikasian wajib memberikan fasilitas kepada anggota penyandang

disabilitas serta memberikan SDM dan SDA yang memadai demi terwujudnya program tersebut.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh *stakeholder* dan pelaksana kebijakan dalam menjalankan program *difabelpreneur* bagi anggota penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra yaitu sebagai berikut: terbatasnya akomodasi transportasi bagi anggota disabilitas, proses pewarnaan dan pencucian kurang efektif dan memerlukan biaya tinggi, kurangnya dukungan dari masyarakat untuk memasarkan atau mengenalkan hasil keterampilan dari anggota disabilitas, proses pemasaran masih sangat rendah dan harga batik tulis cukup mahal karena harga batik tulis sangat tinggi. Sehingga perlu dilakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi setelah program tersebut dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh seorang peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dihasilkan, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Kepada peneliti berikutnya supaya untuk semakin memaksimalkan pada proses pemilahan, penggunaan rujukan dan landasan untuk menjalankan penelitian. Selain itu, berdasarkan penelitian ini juga ditemukan bahwasanya kegiatan tersebut akan menjalankan kegiatan secara mandiri. Hal, tersebut perlu menjadi perhatian khusus apakah

kendala yang dihadapi sudah ditangani atau belum. Kegiatan tersebut untuk melihat apakah program tersebut sudah mampu berjalan ke tahap mandiri atau belum. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kondisi sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan program tersebut terhadap tingkat keberfungsian sosial baik secara sosial dan ekonomi anggota penyandang disabilitas di Desa Tawang Sari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Maka, bagi peneliti selanjutnya sangat diperlukan untuk berfokus kepada penelitiannya terhadap tingkat keberfungsian sosial anggota penyandang disabilitas terhadap program yang telah diberikan.

2. Bagi Stakeholder Workshop Srikandi Patra

Guna untuk mendukung keberlanjutan program tersebut supaya tetap berjalan dengan baik. Maka, diperlukan adanya pembekalan atau pelatihan berkala pasca kebijakan mandiri bagi *workshop* srikandi patra. Sehingga pelatihan tersebut mampu menjadi pendongkrang keberlanjutan program yang dilaksanakan. Maka, untuk melaksanakan kegiatan tersebut sangat diperlukan suatu kebijakan yang mampu memberikan dorongan kepada *stakeholder* sebagai cara untuk memperluas jaringan atau koneksi serta kemitraan dengan pihak yang lain. Tujuannya yaitu untuk tetap mengembangkan program *difabelpreneur* supaya tidak mengalami mogok ditengah jalan. Selain itu, tugas *stakeholder* jika dirasa belum mampu untuk menjalankan program sampai tahap mandiri dituntut untuk tetap mendampingi sampai *workshop* srikandi patra benar-benar siap sampai ditahap mandiri

3. Bagi Relawan Sosial

Hasil penelitian mengenai hambatan yang dihadapi beberapa relawan sosial pada program *difabelpreneur* untuk anggota penyandang disabilitas di *workshop* srikandi patra yaitu mengenai kondisi lembaga, serta kurangnya pelatihan untuk mengembangkan kegiatan tersebut. Maka, peneliti menyarankan supaya relawan sosial untuk meminta bantuan serta kerja sama kepada beberapa pihak atau lembaga sosial terkait untuk membantu memajukan kegiatan tersebut. Seperti melakukan kerja sama pewarnaan, pelatihan berkala dan kegiatan wirausaha sosial melalui UMKM masyarakat maupun Pemerintah Kota. Sehingga, jika *workshop* srikandi patra akan berjalan ke tahap mandiri mampu berjalan dengan baik karena adanya bantuan dari beberapa lembaga sosial terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusamad Z. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Adriansyah, Mohammad Benny Alexandri, dan Mas Halimah. "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (3 Agustus 2021): 13–22. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i1.34108>.
- Aji, Tri Prasetyo dan Dhita Hardiyanti Utami, "The Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program for the Disabilities Empowerment (Case Study: Schizophrenia Entrepreneurship Program for Pertamina Fuel Terminal Sanggaran Empowered Houses)." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 01 no.3 (t.t.).
- Alfatah, Aldi Alfian. "Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta." *Skripsi*, Universitas Gajah Mada, 2021.
- Andi Irawan. "Konsep Implementasi Kebijakan," 8 Juli 2018. <https://www.slideshare.net/andiirawan0828/konsep-implementasi-kebijakan>.
- Aprillia, Ananda, Cucu Sugiarti, dan Lina Aryani. "Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karawang" *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 6, no. 2 (1 Desember 2021): 202–12. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897>.
- Arfana, Nano Tresna. "Ketua MK: Penyandang Disabilitas Bagian Totalitas Masyarakat Indonesia | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 12 Juli 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18346&menu=2>.
- Bhari, Syamsul; Bedjo Sujanto, dan Madhakomala. *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*. 2020 ed. 1. Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ebenhazer. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 3 (18 Maret 2022): 807–12. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.807-812>.

- Ghassania, Shabrina Farahzatu, dan Agus Naryoso. “Pemanfaatan Kegiatan Corporate Social Responsibility Difiablepreneur Sebagai Media Untuk Membangun Reputasi Bisnis Pertamina.” *Interaksi Online* 9, no. 2 (25 Februari 2021): 53–74.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.” *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (21 Oktober 2021): 82–110. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4778>.
- Hendra; Muhammad Nur; Haeril; Junaidi; dan Sri Wahyuni. “Strategi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Pesisir”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, vol.12:1, 2023.
- Jhon W.Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kauntitatif dan Mixed*. 2017.
- Jones, Charles O., *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kurniawan, Cahyadi “120 Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Boyolali ”<https://soloraya.solopos.com/hanya-120-penyandang-disabilitas-di-boyolali-bekerja-di-perusahaan-1209150>, diakses tanggal 01 Mei 2024.
- Kusumajati, Kusumajati, dan Teguh Kurniawan. “Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu.” *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9, no. 2 (3 Desember 2019): 166–76. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2608>.
- Lailla Hammada. “Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas.” Prograam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Lenaini, Ika. “Tehnik Pengambilan Sampel Purposive Sampling dan Snowball Sampling” *Historis : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.
- M Makbul. “Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.” *Prodi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pendidikan dan Keguruan,UIN Alauddin, Makassar*, 2021.
- Muhammad Abdurrohman. “Aksesibilitas dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Pada Transportasi Publik (Studi Kasus PT. Kereta Api

Indonesia Stasiun Yogyakarta DAOP VI Yogyakarta.” Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Pawestri, Aprilina. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol.15:1 (Juni, 2020).

Philona, Rinda, dan Novita Listyaningrum. “Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram.” *JATISWARA* 36, no. 1 (31 Maret 2021): 38–48.

———. “Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram.” *JATISWARA* 36, no. 1 (31 Maret 2021): 38–48.

Propiona, Jane Kartika. “Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (31 Januari 2021).

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*,. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmat, Diding, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan”, *Jurnal Unifikasi*, vol.04:1 (01 Januari 2017), hlm. 37

Rinanti, Ramdhani Puspita, “Implementasi Program Pengembangan Desa Wisata Masaran : Studi Kasus Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Trenggalek, Jawa Timur.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Rohmaini, Ayatullah. “Efektivitas Program Better Lives Yang Dilaksanakan Yayasan Sayap Ibu Bintaro Tangerang Selatan Banten.” *Bachelor Thesis*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Sofiatul Jannah. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Soerabaja Printing Indonesia).” Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah, IAIN Jember, 2021.

Syobah, Sy Nurul. “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 15, no. 2 (18 Desember 2018): 251.

Supanji, Tratama Helmi. “Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” 15 Januari 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>.

Tjilen, Alexander Phuk: *Konsep Teori dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Nusa Media., 2019.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat 1., 2016.

WHO (World Health Organization). "Disability," 7 Maret 2023.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>.

